

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Skenario ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan rencana pembangunan PLTN di Indonesia
  1. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967), ancaman datang dari global, negara-negara barat waspada dan skeptis terhadap ambisi Soekarno untuk memiliki senjata nuklir yang memperoleh dukungan kuat Republik Rakyat Cina (RRC).
  2. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998), tantangan nasional terjadi karena transfer teknologi nuklir dari AS, Kanada, dan Eropa Barat sangat lambat. Selain itu, terdapat gangguan nasional tingginya resistensi sosial, karena masih murahnya harga bahan bakar fosil.
  3. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), hambatan nasional terjadi atas dasar pengurangan dukungan masyarakat terhadap kontestasi Pilpres periode kedua untuk tahun 2009 hingga 2014, yang berakibat pada pembatalan terhadap rencana implementasi pembangunan PLTN. Disamping itu, gangguan daerah juga terjadi melalui gerakan sosial masyarakat sekitar tapak PLTN Muria dan Bangka Belitung yang resisten nuklir.
  4. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024), ancaman nasional lebih sering terjadi, dimana Balitbang Pemerintah diintegrasikan dibawah naungan BRIN, termasuk BATAN. Kebijakan LPNK menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai honorer di BRIN, termasuk para ahli

nuklir yang telah disiapkan untuk pembangunan PLTN. Berdasarkan surat keputusan S.3/SETJEN/ROPEG/OTL.1/1/2002, KLHK membawahi BAPETEN. Skala daerah, terjadi pemutusan kerja masyarakat lokal sebagai tenaga honorer pengamanan reaktor nuklir di kawasan Puspiptek Serpong. Pada masa ini, tantangan skala nasional yakni kebijakan pemerintah untuk “*Go Nuclear*”, yang didukung oleh tantangan kepada Pemerintah supaya PLTN segera terbangun di wilayah Kalbar atas dasar masih terjadinya impor listrik dari SESCO Malaysia yang diajukan oleh Pemerintah Kalbar.

- b. Mitigasi ancaman rencana pembangunan PLTN di Indonesia melalui *First Track Diplomacy* dan *Second Track Diplomacy*, berpedoman pada UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dalam pengambilan keputusan, dan pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam mendukung program pemerintah.
- c. Mitigasi gangguan rencana pembangunan PLTN di Indonesia melalui kebijakan target bauran energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan EBT selain nuklir, sembari mengembangkan rencana pembangunan PLTN, penerapan *Carbon Tax*, pembuatan *Life Cycle Assesment* (LCA) bahan radioaktif PLTN, sosialisasi melalui kerjasama K/L terkait pemanfaatan nuklir terhadap berbagai bidang dan *second track diplomacy*.
- d. Mitigasi hambatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia dapat dilakukan dengan cara para pemangku kebijakan membuat kebijakan pengoptimalan EBT selain nuklir, sembari persiapan pembangunan PLTN, sehingga tidak perlu membatalkan implemementasi kebijakan pembangunan PLTN.
- e. Upaya menghadapi tantangan rencana pembangunan PLTN di Indonesia dapat dilakukan dengan modernisasi teknologi dengan

*Transfer of Technology* (ToT) melalui peningkatan diplomasi energi ke negara pemilik nuklir seperti Jepang, Amerika, Rusia. Keputusan resmi pemerintah untuk “*Go Nuclear*”, salah satunya mempercepat pengesahan RUU EBT dengan pertimbangan matang.

## **5.2 Saran**

Saran yang disampaikan dari penelitian ini dalam upaya dapat terlaksananya PLTN di Indonesia sebagai berikut.

- a. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai mitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) rencana pembangunan PLTN di Indonesia sesuai perkembangan yang terjadi.
- b. Perlu adanya keputusan kebijakan pemerintah untuk “*Go Nuclear*” salah satunya dengan disahkannya RUU EBT.